

PENGARUH *HUMAN CAPITAL* TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI 13 KABUPATEN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013–2022

Muhammad Fahmi Yusuf* dan Banatul Hayati

Departemen Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*Corresponding Email: mfahmiyusuf@students.undip.ac.id

ABSTRACT

Poverty remains a serious issue in developing countries, including Indonesia. Central Java Province has become a focal point as one of the provinces in Indonesia with a high poverty rate, particularly in 13 districts where poverty levels are still above the national average. This study aims to explore how health and education affect poverty levels in these 13 districts. The research adopts a quantitative approach using panel data, covering the period from 2013 to 2022, and involving 13 districts in Central Java Province. The analysis method used is fixed effect model. The results show that the health variable, represented by life expectancy, has a significant negative effect on poverty levels. Similarly, the education variable, represented by the average years of schooling, also has a significant negative effect on poverty levels. However, unemployment shows a significant positive effect on poverty levels. Meanwhile, economic growth has no significant effect on poverty levels in the 13 districts of Central Java Province.

Keywords: Poverty, Health, Education, and Fixed Effect Model (FEM).

 <https://doi.org/10.14710/djoe.41924>

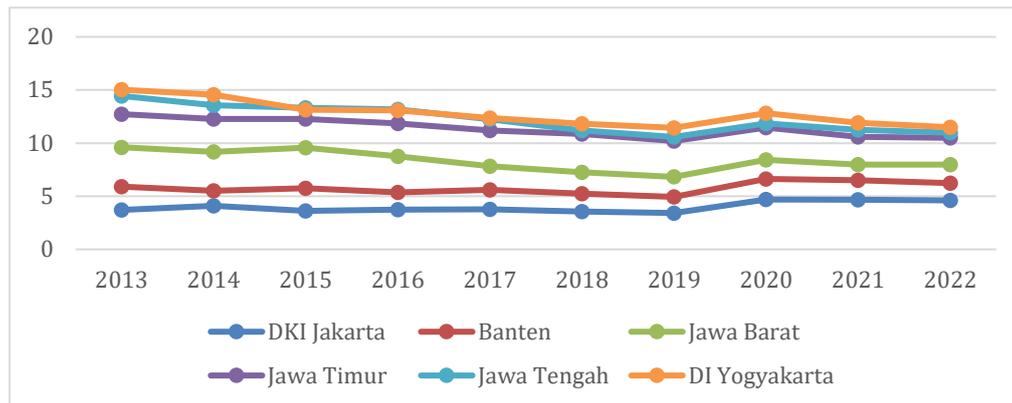


[This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license](#)

PENDAHULUAN

Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terdapat 17 tujuan dan mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun menjadi tujuan utama sebagai permasalahan yang harus diselesaikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik dari makanan atau non makanan. Kondisi kemiskinan akan menyebabkan sebuah masalah-masalah baru dalam kehidupan masyarakat, di antaranya kelaparan, *stunting*, kematian bayi dan tingkat kriminalitas yang meningkat.

Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi dan kasus kemiskinan tersebut masih berpusat di Pulau Jawa. Pada tahun 2022, penduduk miskin di Indonesia berjumlah 26,36 juta penduduk atau sebesar 9,57% dari seluruh masyarakat di Indonesia. Sedangkan, penduduk miskin di Pulau Jawa berjumlah 13,94 juta penduduk atau 9,03% dari total penduduk Pulau Jawa dan jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa sudah mencakup sekitar 50% dari jumlah penduduk miskin di Indonesia.



Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2013 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Berdasarkan Gambar 1, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah Provinsi D.I Yogyakarta di Pulau Jawa. Dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2013 – 2023 pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menargetkan penurunan 1% tingkat kemiskinan setiap tahunnya dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan ditargetkan menyentuh angka 7,48% . Akan tetapi, sampai dengan tahun 2022 tingkat kemiskinan yang terjadi masih diatas tingkat kemiskinan nasional dan termasuk golongan *hard core poverty* (>10%) dan masih cukup jauh dari angka yang ditargetkan. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi sebuah masalah yang perlu dikurangi dan diatasi.

Tabel 1. Persentase Tingkat Kemiskinan 13 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Pulau Jawa Tahun 2013 – 2022

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banyumas	18.44	17.45	17.52	17.23	17.05	13.5	12.53	13.26	13.66	12.84
Purbalingga	20.53	19.75	19.7	18.98	18.8	15.62	15.03	15.9	16.24	15.3
Banjarnegara	18.71	17.77	18.37	17.46	17.21	15.46	14.76	15.64	16.23	15.2
Kebumen	21.32	20.5	20.44	19.86	19.6	17.47	16.82	17.59	17.83	16.41
Purworejo	15.44	14.41	14.27	13.91	13.81	11.67	11.45	11.78	12.4	11.53
Wonosobo	22.08	21.42	21.45	20.53	20.32	17.58	16.63	17.36	17.67	16.17
Klaten	15.6	14.56	14.89	14.46	14.15	12.96	12.28	12.89	13.49	12.33
Sragen	15.93	14.87	14.96	14.38	14.02	13.12	12.79	13.38	13.83	12.94
Grobogan	14.87	13.86	13.68	13.57	13.27	12.31	11.77	12.46	12.74	11.8
Rembang	20.97	19.5	19.28	18.54	18.35	15.41	14.95	15.6	15.8	14.65
Demak	15.72	14.6	14.44	14.1	13.41	12.54	11.86	12.54	12.92	12.09
Pemalang	19.27	18.44	18.3	17.58	17.37	16.04	15.41	16.02	16.56	15.06
Brebes	20.82	20.0	19.79	19.47	19.14	17.17	16.22	17.03	17.43	16.05

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Dalam Provinsi Jawa Tengah terdapat 29 kabupaten dan 6 kota. Berdasarkan Tabel 1, terdapat 13 kabupaten yang masih memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata - rata tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, untuk 16 kabupaten lainnya sudah memiliki tingkat kemiskinan dibawah Provinsi Jawa Tengah dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki tingkat kemiskinan yang cenderung rendah yaitu berada di angka. 4-8%.

Permasalahan kemiskinan yang terjadi dalam sebuah negara dapat dijelaskan melalui sebuah teori lingkaran kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse. Menurut Ragnar Nurkse (dikutip dari Sukirno, 2006) kemiskinan yang terjadi digambarkan sebuah lingkaran kemiskinan yang dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi *supply* dan *demand*. Berdasarkan teori lingkaran perangkap kemiskinan, penyebab kemiskinan salah satunya yaitu adanya tingkat produktivitas rendah dan menurut Todaro&Smith (2011), peningkatan produktivitas dapat melalui peningkatan kesehatan.

Tabel 2 Angka harapan Hidup (Tahun) di 13 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banyumas	72.89	72.92	73.12	73.23	73.33	73.45	73.55	73.72	73.8	73.88
Purbalingga	72.76	72.8	72.81	72.86	72.91	72.98	73.02	73.14	73.21	73.28
Banjarnegara	73.34	73.39	73.59	73.69	73.79	73.91	74.01	74.18	74.28	74.37
Kebumen	72.61	72.67	72.77	72.87	72.98	73.11	73.22	73.4	73.55	73.7
Purworejo	73.77	73.83	74.03	74.14	74.26	74.4	74.52	74.72	74.87	75.03
Wonosobo	70.76	70.82	71.02	71.16	71.3	71.46	71.6	71.82	71.94	72.05
Klaten	76.52	76.54	76.55	76.59	76.62	76.67	76.68	76.78	76.86	76.95
Sragen	75.27	75.31	75.41	75.43	75.55	75.6	75.62	75.71	75.79	75.87
Grobogan	74.03	74.07	74.27	74.37	74.46	74.55	74.61	74.75	74.84	74.93
Rembang	74.16	74.19	74.22	74.27	74.32	74.39	74.43	74.55	74.61	74.68
Demak	75.16	75.18	75.21	75.27	75.27	75.29	75.31	75.4	75.46	75.52
Pemalang	72.59	72.64	72.77	72.87	72.98	73.11	73.22	73.4	73.53	73.65
Brebes	67.81	67.9	68.2	68.41	68.61	68.84	69.04	69.33	69.54	69.74

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa angka harapan hidup di 13 kabupaten mengalami tren yang positif karena dalam 10 tahun terakhir angka harapan hidup di 13 kabupaten Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Secara lebih lanjut, pada tahun 2022 hampir seluruh 13 kabupaten memiliki angka harapan hidup diatas tingkat nasional yaitu 73,6 tahun. Sedangkan, Kabupaten Purbalingga, Wonosobo dan Brebes yang masih memiliki angka harapan hidup dibawah 73,6 tahun.

Menurut teori lingkaran perangkap kemiskinan, kurangnya tingkat produktivitas dalam masyarakat sebagai salah satu penyebab kemiskinan. Kurangnya tingkat produktivitas tidak hanya dapat ditingkatkan melalui komponen kesehatan tetapi juga pendidikan. Menurut Todaro&Smith (2011), pendidikan memiliki peran untuk meningkatkan tingkat produktivitas yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat.

Berdasarkan Tabel 3, rata – rata lama sekolah di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2013 – 2022. Secara lebih lanjut rata.- rata lama sekolah tertinggi berada di Kabupaten Klaten dengan angka 9,09 tahun pada tahun 2022. Sedangkan, Kabupaten Brebes memiliki angka rata – rata lama terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 6,35 tahun.

Berdasarkan Tabel 2 dan 3 dapat terlihat bahwasannya dalam periode 2013 – 2022, angka harapan hidup dan rata – rata lama sekolah pendidikan terus meningkat di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Meskipun kedua hal tersebut terus meningkat, namun tingkat kemiskinan yang terjadi di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah masih tinggi melebihi rata – rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Tabel 3. Rata - Rata Lama Sekolah (Tahun) di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2022

Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Banyumas	7,18	7,31	7,31	7,39	7,4	7,41	7,42	7,52	7,63	7,78
Purbalingga	6,68	6,84	6,85	6,86	6,87	7,0	7,14	7,24	7,25	7,33
Banjarnegara	5,86	5,9	6,17	6,26	6,27	6,28	6,5	6,74	6,75	6,84
Kebumen	6,39	6,75	7,04	7,05	7,29	7,34	7,53	7,54	7,55	7,85
Purworejo	7,57	7,63	7,65	7,66	7,69	7,7	7,91	8,12	8,21	8,32
Wonosobo	5,92	6,07	6,11	6,12	6,51	6,75	6,76	6,81	6,82	6,88
Klaten	7,74	7,92	8,16	8,22	8,23	8,24	8,31	8,58	8,81	9,09
Sragen	6,69	6,85	6,86	6,87	7,04	7,22	7,34	7,65	7,66	7,79
Grobogan	6,25	6,32	6,33	6,62	6,66	6,67	6,86	6,91	7,11	7,26
Rembang	6,7	6,9	6,92	6,93	6,94	6,95	7,15	7,16	7,3	7,41
Demak	7,22	7,44	7,45	7,46	7,47	7,48	7,55	7,71	7,86	8,1
Pemalang	5,72	5,87	6,04	6,05	6,31	6,32	6,41	6,42	6,45	6,5
Brebes	5,68	5,86	5,88	6,17	6,18	6,19	6,2	6,21	6,22	6,35

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk (1) Menganalisis pengaruh kesehatan dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah; (2) Menganalisis pengaruh kesehatan dan pendidikan secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan

Teori lingkaran perangkap kemiskinan adalah teori mengenai kemiskinan yang membentuk lingkaran/satu kesatuan hal - hal yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain dan penyebab masalah kemiskinan ini tak berujung pada menurunnya tingkat kemiskinan di sebuah negara. Teori perangkap lingkaran kemiskinan ini dipopulerkan ekonom yang bernama Ragnar Nurkse. Menurut Ragnar Nurkse (1953) terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang dapat menghalangi tingkat pembangunan yang lebih tinggi yaitu : dari sisi penawaran modal dan dari sisi permintaan modal.

Dari sisi permintaan, kemiskinan terjadi karena kurangnya pembentukan modal yang terjadi akibat kurangnya penanaman modal. Dalam negara yang masih tergolong miskin rangsangan untuk melakukan penanaman modal masih rendah hal ini dikarenakan rendahnya daya beli yang dimiliki oleh masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kurangnya rangsangan untuk para pengusaha melakukan penanaman modal (investasi) dan rendahnya daya beli yang dimiliki masyarakat tersebut disebabkan masih rendahnya pendapatan riil masyarakat dan hal tersebut disebabkan masih kurangnya produktivitas masyarakat.

Dari sisi penawaran, kemiskinan terjadi karena adanya tingkat produktivitas masyarakat yang rendah mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga menjadi rendah kemudian akan terjadi kurangnya penanaman modal yang pada akhirnya akan mengakibatkan suatu negara kekurangan pembentukan modal dan membuat kurangnya barang modal yang akan tetap membuat produktivitas tetap rendah.

Berdasarkan penjelasan dari lingkaran perangkap kemiskinan baik dari sisi penawaran maupun permintaan, tingkat produktivitas yang rendah menjadi salah satu penyebab dari munculnya kemiskinan. Menurut Todaro (2013) tingkat produktivitas

dapat dilihat dari *human capital*. *Human capital* merupakan sebuah istilah ekonomi yang digunakan untuk kapasitas manusia seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas ketika hal tersebut meningkat.

Menurut Todaro (2013) kesehatan dan pendidikan menjadi sebuah sasaran dasar dalam sebuah pembangunan ekonomi dan peningkatan pada kesehatan dan pendidikan dapat mengeluarkan masyarakat dari sebuah lingkaran perangkap kemiskinan. Kesehatan menjadi salah satu prasyarat dalam meningkatkan produktivitas dan penduduk sebuah negara yang memiliki kondisi kesehatan yang baik memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk dengan kondisi kesehatan yang rendah ditandai dengan pendapatan yang diterima masyarakat lebih tinggi.

Selanjutnya, Menurut Todaro (2013) yaitu dengan adanya peningkatan pendidikan yang didapatkan oleh masyarakat. Pendidikan memiliki peran untuk meningkatkan tingkat produktivitas yang lebih baik dan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat sehingga memungkinkan untuk penduduk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penduduk dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari penduduk dengan pendidikan yang lebih rendah.

Dari teori lingkaran perangkap kemiskinan, selain tingkat produktivitas rendah, pendapatan rendah menjadi penyebab munculnya kemiskinan karena kurangnya pendapatan akan membuat masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan yang layak. Selanjutnya, dari sisi *demand* teori perangkap kemiskinan menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya pembentukan modal. Rendahnya pembentukan modal karena terbatasnya luas pasar yang disebabkan daya beli masyarakat yang rendah sehingga permintaan barang menjadi rendah. Semakin meningkat pengangguran berarti semakin rendah daya beli masyarakat.

Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen pertama kali dikembangkan oleh Robert Lucas, oleh Paul Romer dan Robert Barro pada tahun 1988. Teori ini dikenal sebagai teori baru karena pendekatannya yang berbeda dari teori pertumbuhan ekonomi klasik yang menekankan pentingnya faktor eksternal seperti modal dan sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tidak hanya tergantung pada faktor eksternal. Tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Beberapa pemikiran terkemuka dalam teori pertumbuhan ekonomi endogen telah diajukan oleh Romer (1986), Lucas (1988), dan Grossman-Helpman (1991). Kedua model matematis menjelaskan konsep dari model pertumbuhan endogen.

Simple Endogenous Model

Fungsi produksi AK merupakan fungsi produksi yang memiliki asumsi *constant return to scale*.

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \quad (1)$$

Y = total output/produksi dalam perekonomian,
A = total faktor produktivitas,
K = modal (fisik & human capital)
L = tenaga kerja α = elastisitas output kapital.

Endogenous Model dengan Human Capital

Robert Lucas membedakan modal menjadi dua hal, yaitu modal fisik (*physical capital*) dan modal manusia (*human capital*). Perkembangan teknologi ditentukan oleh investasi individu terhadap *human capital*, yang terdiri dari pendidikan dasar, kesehatan, dan pendapatan. Berikut ini model matematis yang dikembangkan oleh Lucas (1988):

$$Y = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{1-\alpha} \quad (2)$$

A = H

H = human capital akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Kenaikan faktor produktivitas total (A) berarti juga peningkatan pada *human capital*. Kenaikan (A) atau (H) dapat terjadi karena adanya peningkatan *human capital* berupa pendidikan dan kesehatan. Menurut Ramirez et al. (2014) kinerja suatu negara dapat diklasifikasi menjadi empat kategori yaitu : virtuous, vicious dan dua tipe lopsidedness, dengan lemah/kuatnya human development (HD-lopsided).

Dalam kasus siklus virtuous, human development akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam kasus lingkaran setan, human development yang buruk akan menyebabkan buruknya produktivitas yang berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya kemiskinan.

Kemiskinan

Kemiskinan menurut Kartasmita (1997) yaitu kemiskinan merupakan permasalahan yang timbul dalam pembangunan yang ditandai dengan adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian terjadi sebuah ketimpangan. Selanjutnya, Kartasmita mengatakan bahwa masyarakat dalam keadaan miskin pada umumnya memiliki keterbatasan kemampuan untuk melakukan usaha dan memiliki keterbatasan dalam mengakses kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dengan masyarakat yang memiliki akses lebih tinggi.

Menurut BPS, kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang berada dalam kondisi serba kekurangan dikarenakan memiliki pengeluaran dalam sebulan kurang / tidak cukup memenuhi standar kebutuhan hidup. Kebutuhan standar hidup diwakilkan dengan garis kemiskinan. Menurut BPS pada tahun 2022 untuk garis kemiskinan berada di angka Rp535.547/bulan dengan garis kemiskinan untuk makanan sebesar Rp397.125/bulan dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422/bulan dan angka ini masih di bawah angka garis kemiskinan ekstrem.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggadini (2015) menyampaikan bahwa angka harapan hidup mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah dan hal yang serupa juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasanah et al. (2021) menyampaikan bahwa angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Didu dan Fauzi (2016) menyampaikan bahwa rata – rata lama sekolah mempunyai hasil negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Lebak dan hal yang serupa juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2018) yang menyatakan rata – rata lama sekolah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Hubungan Kesehatan Dengan Kemiskinan

Menurut World Bank (2002), kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kondisi kesehatan yang tidak baik atau buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dari masyarakat dan akan terjadi pengeluaran yang menghabiskan tabungan rumah tangga sehingga pada akhirnya akan terjadinya penurunan kualitas hidup yang menyebabkan kemiskinan terjadi.

Menurut Wagstaff (2002), salah satu dari penyebab kemiskinan yaitu tingkat kesehatan yang rendah dan tidak mendapatkan pembiayaan kesehatan asuransi kemudian, dengan tingkat kesehatan yang rendah akan menimbulkan sakit dan kurang gizi. Pada akhirnya, menyebabkan hilangnya penghasilan karena tidak dapat bekerja dan adanya biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan pada akhirnya tidak memiliki pendapatan dan berkurangnya tabungan sehingga akan menyebabkan kemiskinan kembali.

H1: Kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

Hubungan Pendidikan Dengan Kemiskinan

Menurut Todaro & Smith (2011) Pendidikan mempunyai peranan penting dalam sebuah negara berkembang untuk menghadapi perkembangan teknologi dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Mankiw (2000) menjelaskan bahwa seseorang yang berpendidikan tinggi dapat menghasilkan gagasan baru tentang bagaimana pilihan terbaik untuk memproduksi barang dan jasa.

Menurut Lincoln (1999) pendidikan formal dan nonformal memiliki peran untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang baik secara langsung melalui pelatihan yang diberikan kepada masyarakat miskin sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan maupun secara tidak langsung dengan melakukan perbaikan dan peningkatan pada produktivitas secara umum yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

H2: Pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan

METODE PENELITIAN

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu : variabel dependen (tingkat kemiskinan), variabel independen (angka harapan hidup dan rata –

rata lama sekolah) dan variabel kontrol (tingkat pengangguran terbuka dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan). Tingkat kemiskinan dalam penelitian ini menggunakan satuan persen, angka harapan hidup menggunakan satuan tahun, rata – rata lama sekolah menggunakan satuan tahun, tingkat pengangguran terbuka menggunakan satuan persen dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan satuan persen. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan seluruh data tersebut didapatkan dari BPS Jawa Tengah dan nasional.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan bantuan *software* Eviews 10. Menurut Gujarati (2009) data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Data yang digunakan yaitu data *time series* 2013 – 2022 dan data *cross section* di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari rata – rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional yaitu: Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Sragen, Rembang, Kebumen, Demak, Grobogan, Pemalang dan Brebes. Dari penggabungan data *tine series* dan *cross section* menghasilkan 130 observasi. Model data panel dalam denelitian ini dapat dinyatakan dengan formula sebagai berikut:

$$TK_{it} = \alpha + \beta_1 AHH_{it} + \beta_2 RLS_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 LPE_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

keterangan :

TK = Tingkat Kemiskinan

AHH = Angka harapan Hidup

RLS = Rata - Rata Lama Sekolah

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta intersep

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

i = *Cross Section* (13 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah)

t = *Time Series* (periode 2013 - 2022)

ε_{it} = Komponen Error di waktu t untuk cross section i

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Chow

Sebelum melakukan estimasi regresi, maka yang dilakukan terlebih dahulu pemilihan model terbaik yaitu dengan uji *chow*, *hausman* dan *lagrange multiplier*. Uji pertama yang dilakukan yaitu Uji *Chow*. Uji *Chow* dilakukan untuk memilih antara *common effect model* dan *fixed effect model*.

Dengan ketentuan apabila nilai probabilitas *cross-section F* dan *cross-section Chi-square* > 0,05 maka model regresi yang terpilih yaitu *common effect model* (CEM) sedangkan apabila nilai probabilitas *cross-section F* dan *cross-section Chi-square* < 0,05 maka model regresi yang terpilih yaitu *fixed effect model* (FEM).

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Test Summary	Statistic	Prob.
Cross Section F	33.833642	0.0000
Cross Section Chi - Square	198.188015	0.0000

Berdasarkan hasil uji *Chow* pada Tabel 4, dapat terlihat bahwa nilai probabilitas dari *cross-section F* dan *cross-section chi-square* bernilai 0.0000. Oleh karena itu, berdasarkan hasil dan nilai probabilitas tersebut yang berada $< 0,05$ maka model regresi yang terpilih yaitu *fixed model effect* (FEM).

Uji Hausman

Pengujian selanjutnya yaitu Uji *Hausman*. Uji *Hausman* merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model regresi yang baik untuk digunakan antara *random effect model* atau *fixed effect model*. Dengan ketentuan, apabila nilai probabilitas *cross-section random* $> 0,05$ maka model regresi yang terpilih yaitu *random effect model* (REM) sedangkan apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka model regresi yang terpilih yaitu *fixed effect model* (FEM).

Tabel 5. Hasil Uji *Hausman*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Prob.
Cross - Section Random	36.627515	0.0000

Berdasarkan hasil uji *Hausman* pada Tabel 5, terlihat bahwa nilai probabilitas *cross-section random* bernilai 0,0000 yang berarti $< 0,05$. Oleh karena itu, berdasarkan hasil dan nilai probabilitas tersebut maka model regresi yang terpilih yaitu *fixed effect model* (FEM). Berdasarkan uji *Chow* dan *Hausman*, maka dalam penelitian ini menggunakan model regresi *fixed effect model* (FEM).

Model dalam penelitian ini, sudah melewati deteksi penyimpangan asumsi klasik yaitu, deteksi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan auto korelasi. Setelah dilakukan pengujian, dalam model tidak terdapat masalah dalam deteksi penyimpangan asumsi klasik.

Tabel 6. Hasil Regresi Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.	F-Statistic	Adj-R ²
C	2.235794	7.448756	0.0000	58.34796	0.876740
AHH	-2.693096	-6.065632	0.0000		
RLS	-1.600123	-3.222756	0.0017		
TPT	0.352564	3.554448	0.0006		
LPE	0.026208	0.575105	0.5664		

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 6 dengan menggunakan *fixed effect model*, hasil uji t statistik dengan signifikansi 0,05 variabel angka harapan hidup, rata – rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, variabel laju pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, F-statistik menghasilkan angka 58.34796 dan f-tabel yang didapat sebesar 2.44. Oleh karena itu, artinya variabel angka harapan hidup, rata – rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka dan laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh secara bersama – sama (simultan) terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, nilai *adjusted R²* menghasilkan angka sebesar 0.876740 yang berarti variabel yang digunakan dalam model penelitian mampu menjelaskan 87,67% variasi variabel tingkat kemiskinan.

Angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien sebesar -2.693096 yang berarti ketika angka rata - rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dengan nilai koefisien sebesar -1.600123.

Selanjutnya, untuk variabel kontrol yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dengan nilai koefisien 0.352564 dan yang terakhir, laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dengan nilai koefisien sebesar 0.026208.

Analisis Pengaruh Angka harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 6, didapatkan bahwa variabel angka harapan hidup sebagai *proxy* dari kesehatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan nilai koefisien sebesar -2.693096 yang berarti bahwa ketika angka harapan hidup meningkat sebesar 1 tahun maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 2,69%, *ceteris paribus*. Hasil tersebut sesuai dengan teori lingkaran perangkap kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini bahwa tingkat produktivitas masyarakat yang rendah menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dapat dengan meningkatkan tingkat produktivitas dan cara untuk meningkatkan tingkat produktivitas dapat dengan memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anggadini (2015) bahwa dalam hasil penelitian tersebut variabel kesehatan dalam hal ini angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang berarti bahwa, peningkatan angka harapan hidup dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Angka harapan hidup di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir tanpa mengalami penurunan. Apabila hal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, maka tingkat kemiskinan dapat dikurangi dengan baik.

Analisis Pengaruh Rata – Rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 6, didapatkan bahwa variabel rata - rata lama sekolah sebagai *proxy* pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan nilai koefisien -1.600123 yang berarti ketika rata - rata lama sekolah meningkat sebesar 1 tahun maka tingkat kemiskinan akan turun 1,6%, *ceteris paribus*. Hasil tersebut sesuai dengan teori lingkaran perangkap kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat produktivitas masyarakat yang rendah menjadi salah satu penyebab kemiskinan dan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dapat dengan meningkatkan tingkat produktivitas dan cara untuk meningkatkan tingkat produktivitas dapat dengan memperbaiki dan meningkatkan pendidikan masyarakat.

Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramesti (2018) bahwa dalam penelitian tersebut variabel pendidikan dalam hal ini rata - rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang berarti bahwa semakin tingginya angka rata – rata lama sekolah dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Rata – rata lama sekolah di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah memiliki tren yang terus meningkat dalam 10 tahun terakhir tanpa mengalami penurunan . Apabila hal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, maka tingkat kemiskinan dapat dikurangi dengan baik.

Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada Tabel 6, didapatkan bahwa variabel kontrol tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan nilai koefisien 0.352564 yang berarti ketika tingkat pengangguran meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,35%, *ceteris paribus*.

Hasil tersebut sesuai dengan teori lingkaran perangkap kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahwa salah satu penyebab kemiskinan yaitu, pembentukan modal yang rendah diakibatkan dari luas pasar yang terbatas dan luas pasar yang terbatas diakibatkan masih rendahnya daya beli masyarakat daya beli masyarakat yang rendah diakibatkan pengangguran yang masih meningkat.

Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil estimasi regresi pada tabel 6, didapatkan bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa, teori trickle down effect yaitu dampak pertumbuhan ekonomi yang terjadi seharusnya dapat dinikmati sampai golongan paling bawah atau penduduk yang tergolong miskin tidak terjadi di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 7. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022 (Persen)

Kabupaten	20% atas			40% bawah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Banyumas	43,36	44,61	43,84	18,47	18,85	19,39
Purbalingga	43,13	44,94	43,98	19,57	19,37	19,33
Banjarnegara	43,98	43,94	44,65	17,92	18,19	18,74
Kebumen	40,67	42,94	43,75	20,02	19,30	19,86
Purworejo	44,63	42,61	44,49	19,76	20,24	20,10
Wonosobo	43,90	46,04	44,38	18,76	17,61	18,61
Klaten	42,40	43,63	44,98	20,13	19,59	19,17
Sragen	42,01	40,12	43,56	19,87	21,05	19,47
Grobogan	42,43	42,79	42,52	19,30	19,29	20,58
Rembang	41,66	41,42	41,41	19,86	20,09	20,69
Demak	36,59	37,67	38,72	22,86	22,79	21,52
Pemalang	40,69	41,54	40,94	20,44	20,06	20,88
Brebes	40,23	42,86	42,61	19,85	19,14	19,77

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik), 2023

Dengan belum terjadinya *trickle down effect*, hal tersebut berkaitan dengan ketimpangan yang berada dalam masyarakat. Berdasarkan Tabel 7 dapat terlihat bahwa, di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah masih mengalami ketimpangan distribusi pengeluaran (pendapatan). Dalam tiga tahun terakhir, 40% golongan bawah (miskin) di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah hanya menikmati pengeluaran (pendapatan) berada di kisaran 17,92% - 22,86%. Sedangkan, dalam tiga tahun

terakhir, 20% golongan atas di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah menikmati pengeluaran (pendapatan) berada di kisaran 36,59% - 44,94%.

Oleh karena itu, ketimpangan pengeluaran (pendapatan) masih terjadi di 13 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah yang mana pengeluaran (pendapatan) yang dinikmati masyarakat masih cenderung berpihak kepada 20% golongan atas. Sedangkan, 40% golongan bawah masih belum mampu menikmati pengeluaran (pendapatan) seperti yang dinikmati 20% golongan atas.. Seharusnya, pengeluaran (pendapatan) yang didapatkan dan dinikmati masyarakat dapat didistribusikan secara lebih merata sehingga dampak dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil estimasi regresi dan pembahasan, bahwa variabel angka harapan hidup memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan tingkat kesehatan dapat meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat yang kemudian dengan aset yang dimiliki yaitu tenaga untuk bekerja dapat membuat masyarakat untuk bekerja dalam pekerjaan dan mendapatkan pendapatan layak yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil estimasi regresi dan pembahasan, bahwa variabel rata - rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dapat sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan tingkat produktivitas masyarakat dan juga peningkatan kualitas SDM masyarakat sehingga memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan pada 13 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Implikasi kebijakan disarankan bagi pemerintah dapat melakukan pembangunan dan kebijakan yang mendukung peningkatan tingkat produktivitas melalui kesehatan seperti, meningkatkan akses dan kualitas kesehatan pemberian akses kesehatan gratis, melakukan percepatan perbaikan gizi dan lainnya. Selanjutnya, pemerintah kebijakan disarankan bagi pemerintah dapat melakukan pembangunan dan kebijakan yang mendukung pendidikan seperti, pemberian beasiswa pada masyarakat yang tidak mampu, peningkatan mutu layanan pendidikan dan pengadaan pendidikan formal dan non formal berupa program kejar paket A,B dan C.

REFERENSI

- Anggadini, F. (2015). Analisis pengaruh angka harapan hidup, angka melek huruf, tingkat pengangguran terbuka, dan pendapatan domestik regional bruto perkapita terhadap kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2010-2013. *Katalogis*, 3(7).
- Arsyad, L. (1999). *Ekonomi pembangunan*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN: Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2023). *Data tingkat kemiskinan Kabupaten–Kota Jawa Tengah 2013–2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data umur harapan hidup menurut Kabupaten–Kota Jawa Tengah 2013–2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data rata-rata lama sekolah menurut Kabupaten–Kota Jawa Tengah 2013–2022*.

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2023). *Data tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten–Kota Jawa Tengah 2013–2022*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Data laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan menurut Kabupaten–Kota Jawa Tengah 2013–2022*.
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2023). *Data distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia 2020–2022*.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1).
- Gujarati, D. N. (2013). *Dasar-dasar ekonometrika* (Mangunsong, R. C., Trans.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, R., Syaparuddin, S., & Rosmeli, R. (2021). Pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 223–232.
- Kartasmita, G. (1997). *Administrasi pembangunan: Perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*.
- Mankiw, N. G. (2006). *Teori ekonomi makro*. Jakarta: Erlangga.
- Pramessti, N. A. T., & Bendesa, I. K. G. (2018). Pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(9), 1887–1917.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi pembangunan* (Edisi Kedua, Jilid 8). Jakarta: Kencana.
- Todaro, M., & Smith, S. (2013). *Pembangunan ekonomi* (Edisi Kesebelas, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.
- Nurkse, R. (1953). Teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty).
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic growth and human development. *World Development*, 28(2), 197–219.
- Wagstaff, A. (2002). Poverty and health sector inequalities. *Bulletin of the World Health Organization*, 80, 97–105.